

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, memenuhi hak kebutuhan dasar yang diselenggarakan melalui pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terprogram, terarah, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah dengan fokus pada 7 (tujuh) permasalahan sosial yakni ***Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran***, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai adanya perubahan paradigma pembangunan yang bergeser ke arah ***desentralistik dalam suasana otonomi daerah*** yang memberikan peran lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama pembangunan serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun disatu sisi, pelaksanaan otonomi tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan ditemuinya dampak negatif yang berakibat pada peningkatan kualitas persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan dengan berbagai problematikanya, meningkatnya pengangguran seiring dengan semakin menyempitnya peluang kerja serta akses lainnya.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis urusan wajib bidang sosial melaksanakan tugas pokok dalam penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Prinsip ***To Help People To Help Them Selves*** (membantu

masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri) dan semangat ***Tat Twam Asi*** (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses ***memanusiakan manusia*** sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah adalah **semakin berkurangnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**, yang diimplementasikan melalui 2 (dua) model pendekatan yakni **pendekatan berbasis kelembagaan (Balai dan Unit Rehabilitasi Sosial)** dan **yang berbasis masyarakat**, melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang Sosial;
3. Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4. Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial;
6. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan suasana keamanan dan kenyamanan yang kondusif, namun dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program yang mendukung terwujudnya **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"** sebagaimana dimaksud di dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2013 – 2018.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang ditinjau kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Pedoman Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2013 - 2018) yang terangkum dalam rumusan Visi, Misi, Target, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

2. Tujuan

- a. Mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah tahun 2013-2018 kedalam arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana TUPOKSI Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- b. Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah yang mengarah kepada Visi, Misi, Tujuan, Program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun.
- c. Sebagai tolok ukur dan penilaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS SOSIAL

Memuat tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

BAB III : ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian Sosial RI dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

BAB IV : VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat tentang Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

BAB VI : INDIKATOR KENERJA DINAS SOSIAL MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD).

Memuat tentang Indikator Kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

BAB VII : PENUTUP

Memuat tentang proses transisi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

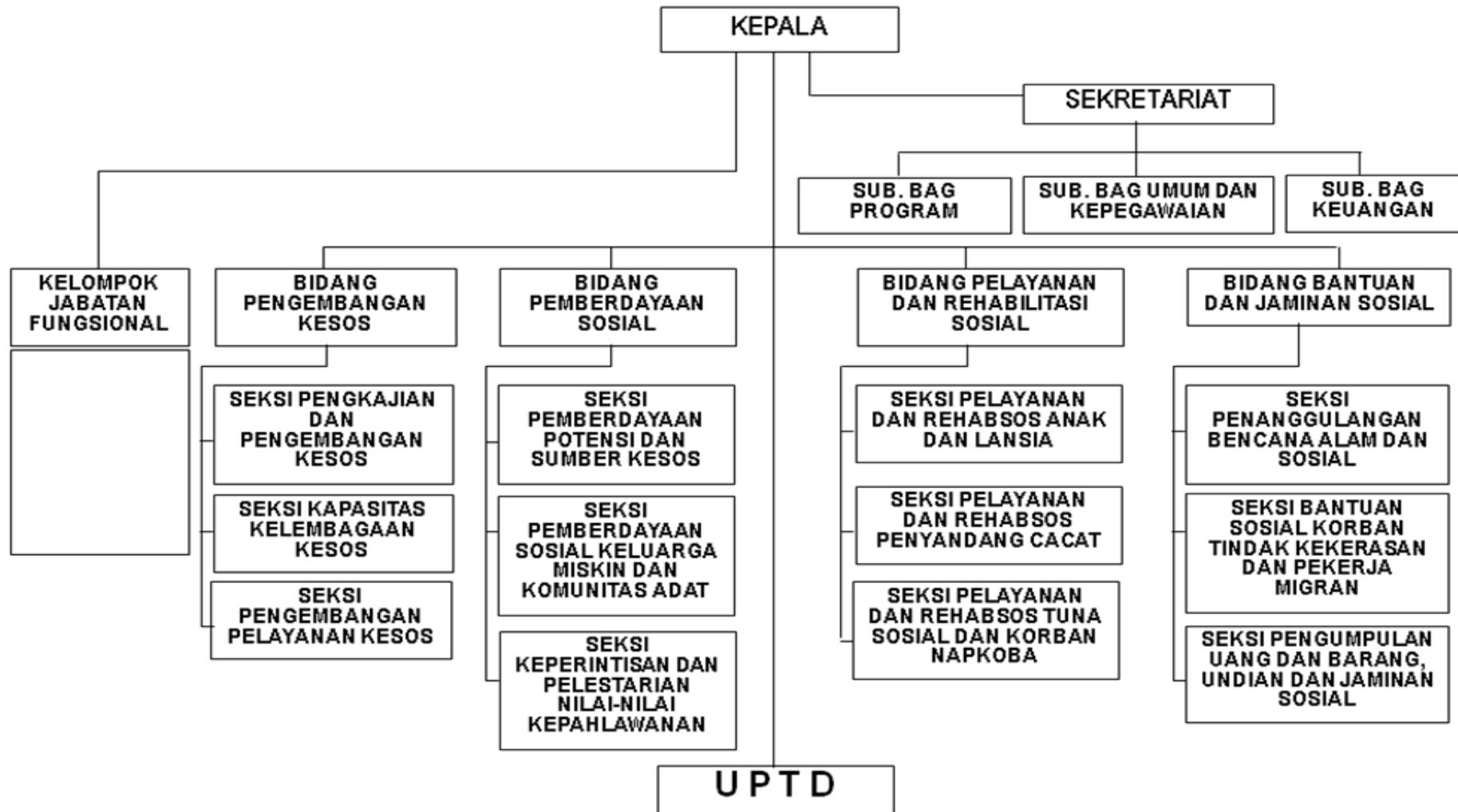
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- 3) Pembinaan dan fasilitasi bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- 4) Pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan kesejahteraan sosial;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- 6) Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH



B. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah per 1 Oktober 2013 sejumlah 942 orang terbagi atas 195 orang pegawai bertugas pada kantor Dinas Sosial dan 747 orang pegawai bertugas pada Balai dan Unit Rehabilitasi Sosial. Secara terperinci kondisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	LOKASI	TINGKAT PENDIDIKAN						JML
		SD	SLTP	SLTA	D III	S1/D IV	S.2	
1.	Dinas Sosial Prov Jateng	6	12	80	17	93	20	228
	a. PNS	5	6	61	15	88	20	195
	b. Harian Lepas							
	1) Masuk Data Base BKD	-	1	4	1	2	-	8
	2) Tidak Masuk Data Base BKD/Kontrak	1	5	15	1	3	-	25
2.	Unit Pelaksana Teknis (Balai Rehabilitasi Sosial)	57	60	418	52	228	51	868
	a. PNS	33	50	360	40	213	51	747
	b. Harian Lepas							
	1) Masuk Data Base BKD	16	3	7	1	3	-	29
	2) Tidak Masuk Data Base BKD/Kontrak	8	8	51	11	12	-	92
JUMLAH SELURUHNYA		63	72	498	69	321	71	1.096

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah

Tabel 2. SDM BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

NO.	LOKASI	PANGKAT/GOLONGAN					JUMLAH
		I	II	III	IV	HARLEP	
1.	Dinas Sosial Provinsi Jateng	3	29	155	8	32	227
2.	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jateng	50	163	490	44	121	868
JUMLAH SELURUHNYA		53	192	645	52	153	1.137

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah

Tabel 3. SDM BERDASARKAN JABATAN

NO	LOKASI	STRUKTURAL			FUNGSIONAL		JUMLAH
		ESL. II	ESL. III	ESL. V	PEKSOS AHLI	PEKSOS TRAMPIL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dinas Sosial Prov. Jateng	1	5	14	-	-	20
2	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Prov. Jateng	-	27	75	39	84	225
JUMLAH SELURUHNYA		1	32	89	39	84	245

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah

Sarana prasarana berupa gedung kantor dan asrama untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sistem kelembagaan sebanyak 705 unit yang tersebar pada kompleks kantor Dinas Sosial dan TMP Giri Tunggal Semarang sebanyak 6 unit serta 699 unit bangunan yang tersebar pada 27 Balai Rehabilitasi Sosial di Jawa Tengah, merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat/ PMKS, yang terdiri dari:

Tabel 4. DAFTAR NAMA BALAI REHABILITASI SOSIL DINAS SOSIAL

NO	BALAI (UPT)	UNIT	SASARAN
1	2	3	4
1	Balai Rehabilitasi Sosial PGOT "MARDI UTOMO" Semarang		Pengemis Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT)
2	Balai Rehabilitasi Sosial Eks PENYALAHGUNA NAPZA "MANDIRI" Semarang		Eks Penyalahguna NAPZA
		Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia PUCANG GADING Semarang	Lanjut Usia Terlantar
3	Balai Persinggahan Sosial "MARGO WIDODO" Semarang		PMKS

4	Balai Rehabilitasi Sosial Anak "WIRA ADHI KARYA" Ungaran		Anak Putus Sekolah
		Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia "WENING WERDOYO" Ungaran	Lanjut Usia Terlantar
5	Balai Rehabilitasi Sosial Eks PSIKOTIK "NGUDI RAHAYU" Kendal		Eks Psikotik
		Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik & Kronis "BINA SEJAHTERA" Kendal	Eks Psikotik & Eks Penderita Penyakit Kronis
6	Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia CEPIRING Kendal		Lanjut Usia Terlantar
		Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak "PAMARDI SIWI" Kendal	Anak Terlantar
7	Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak "KASIH MESRA" Demak		Anak Terlantar
		Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak "PAMARDI PUTRA" Demak	Anak Terlantar
8	Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak "HARAPAN BANGSA" Rembang		Anak Terlantar
		Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia "MARGO MUKTI" Rembang	Lanjut Usia Terlantar
9	Balai Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik "PANGRUKTI MULYO" Rembang		Eks Psikotik
		Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik "PAMARDI KARYA" Blora	Eks Psikotik
10	Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra "PENDOWO" Kudus		Disabilitas Netra
		Unit Rehabilitasi Sosial PGOT "MURIA JAYA" Kudus	PGOT
		Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik "SONO RUMEKSO" Grobogan	Eks Psikotik

11	Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak "SUNU NGESTITOMO" Jepara		Anak Terlantar
		Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik "WALUYOTOMO" Jepara	Eks Psikotik
12	Balai Rehabilitasi Sosial "WANITA UTAMA" Surakarta		WTS
		Unit Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra "BHAkti CANDRASA" Surakarta	Disabilitas Netra
13	Balai Rehabilitasi Sosial Anak "TARUNA YODHA" Sukoharjo		Anak Putus Sekolah
		Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik "ESTITOMO" Wonogiri	Eks Psikotik
14	Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak "PAMARDI UTOMO" Boyolali		Anak Terlantar
		Unit Rehabilitasi Sosial PGOT "HESTINING BUDI" Klaten	PGOT
15	Balai Rehabilitasi Sosial Anak "DHARMA PUTERA" Purworejo		Anak Putus Sekolah
		Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia "WILOSO WREDHO" Purworejo	Lanjut Usia Terlantar
		Unit Rehabilitasi Sosial Disabilitas Rungu Wicara "WIRA KARYA TAMA" Purworejo	Disabilitas Rungu Wicara
16	Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak "WILOSO MUDA MUDI" Purworejo		Anak Terlantar
		Unit Rehabilitasi Sosial PGOT "MARDIGUNO" Kebumen	PGOT
17	Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia "DEWANATA" Cilacap		Lanjut Usia Terlantar
		Unit Rehabilitasi Sosial Eks Psikotik "MARTANI" Cilacap	Eks Psikotik
18	Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak "BUDHI SAKTI" Banyumas		Anak Terlantar

		Unit Rehabilitasi Sosial PGOT "PAMARDI RAHARJO" Banjarnegara	PGOT
19	Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Grahita Dan Ganda "RAHARJO" Sragen		Disabilitas Grahita & Ganda
20	Balai Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan "KARTINI" Tawangmangu		Anak Jalanan
		Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak "PAMARDI SIWI" Sragen	Anak Terlantar
21	Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak "SUKO MULYO" Tegal		Anak Terlantar
		Unit Pelayanan Sosial Lanjut Usia KLAMPOK Brebes	Lanjut Usia Terlantar
22	balai rehabilitasi sosial pgot dan eks psikotik "SAMEKTO KARTI" Pemalang		PGOT Dan Eks Psikotik
23	Balai Pelayanan Sosial Lanjut Usia "BISMA UPAKARA" Pemalang		Lanjut Usia Terlantar
		Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak "KARYA MANDIRI" Pemalang	Anak Terlantar (50 PM)
24	Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra "DISTRARAstra" Pemalang		Disabilitas Netra
		Unit Rehabilitasi Sosial Anak "PUTERA HARAPAN" Slawi	Anak Putus Sekolah
25	Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak "WORO WILOSO" Salatiga		Anak Terlantar
		Unit Pelayanan Sosial Anak Balita "WILOSO TOMO" Salatiga	Anak Balita Terlantar
		Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak "TAMAN HARAPAN" Salatiga	Anak Terlantar

26	Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Netra "PENGANTHI" Temanggung		Disabilitas Netra
		Unit Pelayanan Sosial Asuhan Anak "MARDI YUWONO" Wonosobo	Anak Terlantar
27	Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak "KUMUDA PUTERA PUTERI" Magelang		Anak Terlantar

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 53 Tahun 2013.

C. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Implementasi pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 diarahkan pada 2 (dua) target yakni :

1. Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Tengah sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta melaksanakan 2 (dua) pendekatan yakni penanganan PMKS berbasis kelembagaan melalui Balai Rehabilitasi Sosial dan berbasis peran serta masyarakat bekerjasama dengan Institusi Sosial di Kabupaten/Kota. Hasil penanganan terhadap PMKS tahun 2008 – 2012 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.

Hasil Penanganan PMKS Tahun 2008 – 2012

Tahun 2008	Populasi PMKS	6.701.000 jiwa
	Penanganan	2.835 jiwa (0,04 %)
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	1.678 jiwa (0,02 %)
Tahun 2009	Populasi PMKS	6.584.535 jiwa
	Penanganan	6.260 jiwa (0,1 %)
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3.491 jiwa (0,05 %)
Tahun 2010	Populasi PMKS	6.243.091 jiwa
	Penanganan	42.706 jiwa (0,7 %)

	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3.003 jiwa (0,04 %)
Tahun 2011	Populasi PMKS	6.111.535 jiwa
	Penanganan	118.935 jiwa (1,95 %)
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4.426 jiwa (0,07 %)
Tahun 2012	Populasi PMKS	6.090.369 jiwa
	Penanganan	144.217 jiwa (2,00 %)
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	7.257 jiwa (0,11 %)

2. Populasi PMKS tahun 2012 sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2013-2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.
POPULASI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

NO	JENIS PMKS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Keterlantaran	121.609	128.221	249.830
2	Kecacatan	137.452	99.948	237.400
3	Ketunaan	41.989	21.516	64.340
4	Kemiskinan	2.354.640	2.508.360	4.863.000
5	Korban bencana	41.806	42.657	84.463
6	Keterpencilan	2.217	2.022	4.239
7	KTK-PM	1.271	2.122	4.721
JUMLAH		2.700.984	2.804.846	5.507.993

3. Meningkatkan dan menguatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelayanan kesejahteraan sosial PMKS diupayakan melalui penguatan kapasitas dan motivasi PSKS dengan melaksanakan kegiatan pelatihan motivasi, pelatihan pengenalan dan pemahaman masalah kesejahteraan sosial, penyediaan sarana operasional kinerja, pemberian bantuan sarana prasarana organisasi PSKS. Data penanganan

PSKS oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012 sebagai berikut:

Tabel. 6.
Penguatan Kapasitas PSKS Tahun 2008 – 2012

Tahun 2008	Populasi PSKS	197.316
	PSKS ditangani	300 (0,15 %)
Tahun 2009	Populasi PSKS	197.316
	PSKS ditangani	710 (0,36 %)
Tahun 2010	Populasi PSKS	197.316
	PSKS ditangani	1.067 (0,54 %)
Tahun 2011	Populasi PSKS	197.316
	PSKS ditangani	1.008 (0,51 %)
Tahun 2012	Populasi PSKS	197.316
	PSKS ditangani	2.612 (1,32 %)

4. Kondisi PSKS yang menjadi sasaran garapan Dinas Sosial tahun 2013-2018 terdiri atas:

Tabel. 7
Data PSKS Sasaran Garapan Dinas Sosial
Tahun 2013 – 2018

No	Jenis PSKS	Jumlah
1.	Organisasi Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	1.916 lembaga.
2.	Karang Taruna	7.050 Lembaga
3.	Pekerja Sosial Masyarakat	36.448 orang
4.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	573 orang
5.	Dunia Usaha	1.239 Perusahaan

Capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator capaian Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 sebagai berikut:

Tabel 8. MATRIKS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2008 – 2013

No	Program	Indikator Program	Capaian Kinerja				
			2008	2009	2010	2011	2012
I	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang memperoleh bimbingan /pelatihan	300	710	1.067	1.008	2.612
II	Program Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya	Jumlah panti yang melaksanakan standar pelayanan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial	27	27	27	27	27
		Persentase (%) PMKS skala provinsi dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0,02	0,05	0,04	0,07	0,11
		Jumlah perintis kemerdekaan/ keluarga, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelayanan kesejahteraan sosial	54	54	54	54	54
III	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) panti sosial milik provinsi Jawa Tengah dalam (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	17,30	15,38	9,61	9,61	21,15

IV	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kabupaten / kota yang mendapatkan bantuan sosial bagi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki sarpras tanggap darurat lengkap	35	35	35	35	35
V	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh jaminan sosial	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003
VI	Program Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan PMKS lainnya	Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani	2.835	6.260	42.706	118.935	144.217

Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota secara implisit dan eksplisit mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti dengan/atau menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal Bidang kesejahteraan Sosial sebagai peta jalan perumusan program, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan. Dinas Sosial selaku SKPD teknis pelaksana urusan sosial menindaklanjutinya dengan menginisiasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui **Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2015**. Adapun capaian kinerja penerapan SPM 2010 s.d 2013 sebagai berikut:

Tabel. 9 DATA PROFIL PENERAPAN DAN TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN NASIONAL	Capaian 2011	TARGET 2012	Capaian 2012	Target 2013	Capaian 2013	TAHAPAN TARGET CAPAIAN (%)				
										2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala provinsi	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	2015	80%	1,87%	23,17%	72,10%	2,56%	23,80%	2,11%	3,23%	13,61%	13,58%	12,61%
2	Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti skala provinsi	Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	2015	60%	75%	25%	25%	10,50%	25,00%	12,25%	12,25%	20,00%	20,00%	20,00%
3	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	2015	80%	75%	21,15%	19,23%	15,08%	21,15%	18,76%	26,93%	20,00%	20,00%	20,00%
4	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/ LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	2015	60%	45%	19,05%	15,92%	12,51%	23,80%	11,73%	19,84%	25,18%	25,93%	28,89%

5	Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	Persentase (%) kabupaten/ kota yang mengalami bencana memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	2015	80%	62,86%	88,57%	88,57%	82,48%	42,86%	82,94%	83,15%	24,62%	24,62%	30,77%
6	Evakuasi korban bencana skala provinsi	Persentase (%) kabupaten/ kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi.	2015	80%	62,86%	88,57%	88,57%	82,31%	42,86%	81,98%	84,29%	21,22%	27,76%	31,02%
7	Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial skala Provinsi	Persentase (%) kabupaten/ kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	2015	40%	57,14%	71,43%	71,43%	49,09%	28,57%	49,76%	52,57%	20,36%	20,80%	18,82%

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Jawa Tengah yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
2. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PMKS Jalanan.
3. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia aparatur penyelenggara kesejahteraan sosial, Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.
4. Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun *Stakeholders* belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui *Coorporate Social Responbility (CSR)* bidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

Peluang dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi

tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan Dunia Usaha.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab instansi sosial secara berjangka dari pusat hingga Kabupaten/Kota.
3. Revitalisasi panti sosial menjadi Balai Rehabilitasi Sosial memberikan nuansa dan spirit baru dalam pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sistem kelembagaan.
4. Optimalisasi anggaran belanja daerah melalui penyusunan *Roadmap* indikasi program, kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target Rencana Strategis Dinas Sosial.
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial milik masyarakat.
6. Kerjasama *stakeholders* baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial. Korelasi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan kesejahteraan sosial. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpul hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah antara lain:

- a. Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur secara kualitas dan kuantitas terutama karena masih minimnya jumlah pekerja sosial fungsional dan penyuluh sosial fungsional pada Balai Rehabilitasi Sosial dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- c. Belum optimalnya kemitraan strategis dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang mampu mendorong pengalokasian anggaran APBD Kabupaten/Kota dan penyediaan *shelter* untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- d. Belum optimalnya peran Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu didorong melalui inisiasi kebijakan ***Home Care Services*** dan ***Day Care Services*** dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- e. Belum simultannya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- f. Belum optimalnya intergrasi program dan kegiatan secara menyeluruh antar unit teknis Dinas Sosial yang berdampak pada kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS.

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Visi pembangunan Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan adalah **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI** "*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*" yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) misi yaitu:

1. Misi I :

Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

2. Misi II :

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

3. Misi III :

Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Prov.Jateng yang bersih, jujur dan transparan, "*mboten korupsi, mboten ngapusi*".

4. Misi IV :

Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.

5. Misi V :

Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

6. Misi VI :

Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

7. **Misi VII :**

Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jateng yg berkelanjutan & ramah lingkungan.

Sebagaimana visi dan misi diatas, maka pelaksanaan **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah** dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial **akan mendukung pencapaian 2 (dua) misi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni misi II yang terkait dengan dukungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dan misi IV yang terkait dengan dukungan dalam memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.**

C. Telaah Renstra Kementerian Sosial RI dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010 – 2014 disusun dalam rangka untuk mempertegas posisi dan peranan sektor kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan yang harus didukung oleh komitmen dari unsur pimpinan dan bersinergi; konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah; keberpihakan pada kesejahteraan sosial PMKS; peran serta masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha secara aktif; sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 yang memuat dalam upaya menggeser paradigma urusan sosial yang semula sekedar urusan residual menjadi urusan wajib yang didukung oleh akurasi

data dan indikator kinerja terukur; diimplementasikan kedalam 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial; dilaksanakan secara sinergis melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (pilar *good governance*); serta berorientasi kepada pemulihan sosial psikologis PMKS dan penguatan kapasitas PSKS.

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1. Telaah Dokumen RTRW dan Kajian KLHS.

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib sosial kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan Balai Rehabilitasi Sosial yang berpotensi dapat menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar dan mendukung percepatan rehabilitasi sosial eks Psikotik, Eks Narkoba, Tuna Laras dan Anak Nakal; pola-pola penanganan preventif bagi masyarakat didaerah rawan bencana serta shelter bagi Korban Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang (hirarkis), yakni: instrumental, transformatif dan substantif yang didukung kehadiran *good*

governance yang diindikasikan oleh adanya keterbukaan, transparansi, dan tersedianya aneka pilihan kebijakan, rencana, atau program. Dalam konteks implementasi kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tugas pokok fungsi Dinas Sosial, KLHS telah memberikan nuansa dan arah kebijakan dalam penanganan PMKS yang menjamin keberlangsungan hidup, peran serta dalam menikmati hasil penerapan kebijakan serta memberikan harapan baru bagi semakin kuatnya keberfungsian sosialnya.

2. Penetapan Isu Strategis

Berbagai isue muncul sebagai dampak dari proses pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama ini antara lain:

- a. Perlindungan sosial anak dan lanjut usia yang berperspektif penyediaan tumbuh kembang anak dan penyediaan keberlanjutan kehidupan lanjut usia dalam program *daycare services*.
- b. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas, eks penyandang penyakit sosial serta penyusunan payung hukum pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
- c. Perlindungan dan jaminan sosial terhadap pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam serta pekerja sektor informal.
- d. Penguatan kapasitas stakeholders dalam kerangka pengumpulan dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan menguatnya keberpihakan dunia usaha dalam penanganan PMKS.
- e. Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta perintis kemerdekaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mendukung penanganan PMKS.
- g. Intergrasi program dan kegiatan antar unit teknis Dinas Sosial sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial PMKS melalui penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif dan *sustainable*.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN & SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah **"MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS MELALUI PEMBERDAYAAN PSKS YANG PROFESIONAL"**. Visi tersebut mengandung maksud bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk mewujudkan kemandirian PMKS melalui peningkatan kualitas dan jangkauan layanan, termasuk melalui pemberdayaan dan penguatan PSKS dengan berpedoman kepada 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam yang dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yakni:

- a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran target kinerja Dinas Sosial 5 (lima) tahun kedepan diarahkan pada penanganan 26 jenis PMKS sebanyak 173.355 jiwa atau 3 % dari total populasi PMKS di Jawa Tengah, penguatan kapasitas 12 jenis PSKS

sebanyak 12.200 PSKS, serta peningkatan sarana dan prasarana di 27 Balai Rehabilitasi Sosial, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10.
SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL
TAHUN 2013 – 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					Target Akhir
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan	33.712	34.807	35.352	35.147	34.337	173.355
2.	Pemberdayaan PSKS	Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS	2.298	2.368	2.468	2.508	2.558	12.200
3.	Peningkatan Kualitas Layanan Balai Rehabilitasi Sosial	Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Provinsi yang mendapatkan peningkatan sarana dan prasarana	10	12	12	12	12	58

Secara teknis visi dan misi tersebut dijabarkan melalui 4 (empat) Bidang Teknis dan 1 (satu) Sekretariat, sebagai berikut:

1. MISI 1 :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial PMKS;

TUJUAN:

- a. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat).
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.

2. MISI 2 :

Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin dan keluarga serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

TUJUAN:

- a. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- c. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

3. MISI 3 :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;

TUJUAN :

- a. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.
- b. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang, undian dan jaminan sosial.

4. MISI 4 :

Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

TUJUAN :

- a. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

5. MISI 5 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TUJUAN :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

C. Strategi dan Kebijakan.

Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 9 (sembilan) pendekatan yakni:

1. **Pendampingan dan Perlindungan Sosial**, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan.
2. **Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial**, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.
3. **Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS Dalam Penanganan PMKS**, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.
4. **Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan**, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemukan potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai *stakeholders* yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS.
5. **Perlindungan dan Jaminan Sosial**, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat

rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.

6. **Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Pelaksana Kesejahteraan Sosial**, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
7. **Peningkatan Kesadaran dan Tanggungjawab Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
8. **Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial termasuk peningkatan layanan pada Balai Rehabilitasi Sosial.
9. **Peningkatan Kualitas Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS.

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah diarahkan kepada:

1. Perlindungan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan anak sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak.
2. Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat), Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
3. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS eks penyandang penyakit sosial.
4. Penguatan kapasitas PSKS (motivasi, pengetahuan, ketrampilan dan penyediaan daya dukung lainnya) dalam penanganan PMKS
5. Pemberdayaan Sosial Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Komunitas Adat Terpencil

serta Meningkatkan semangat keperintisan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.

6. Penyediaan logistik dan dapur umum bagi korban bencana, pengerahan TAGANA di lokasi Bencana serta Penyiapan TAGANA yang tangguh.
7. Pengawasan pelaksanaan undian berhadiah (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB).
8. Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal.
9. Fasilitasi Koordinasi dan monitoring pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah.
10. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial terarah, terpadu, berkelanjutan dan profesional.
11. Membangun kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
12. Kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS.
13. Penyediaan sarana dan parasana balai rehabilitasi sosial milik pemerintah provinsi yang memadai.
14. Penyediaan SOSH permakanan Penerima Manfaat Balai Rehabilitasi Sosial, Kelayan Panti Swasta, permakanan orang terlantar.
15. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan penganggaran.

Tabel 11.
MATRIK VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2013-2018.

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
Mewujudkan Kemandirian Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui Pemberdayaan PSKS Yang Profesional	1 Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlantar	Anak terlantar	Pendampingan dan perlindungan sosial	
			Lanjut usia terlantar	Pendampingan dan perlindungan sosial	
			Anak Nakal/ Anak Berhadapan dengan Hukum	Pendampingan dan perlindungan sosial	
			Anak Jalanan	Pendampingan dan perlindungan sosial	
			Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Disabilitas (penyandang cacat)	Penyandang Disabilitas (Cacat)	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
				Masyarakat yang rentan mengalami kecacatan/ penyandang disabilitas	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial

		Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan (BWBLP)	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
			Eks Pekerja Sosial Komersial (PSK)	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
			Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
			Eks Korban Narkoba/ NAPZA	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
			PGOT dan TRC	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
			PGOT	Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial sosial
	2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan sosial Keluarga, Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS
			Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS

			Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS
			Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS
			Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS
			Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS
			Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS
			Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam penanganan PMKS
		Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE)	Pemberdayaan sosial dan membangun jejaring kemitraan

			Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Pemberdayaan sosial dan membangun jejaring kemitraan
		Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Perintis kemerdekaan, veteran, janda pahlawan dan keluarganya yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	Perlindungan sosial
	3 Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial	Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Peran aktif dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat
			Lokasi Bencana	Peran aktif dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat
			Taruna Siaga Bencana	Peran aktif dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat
		Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Perlindungan dan rehabilitasi sosial

			Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Perlindungan dan rehabilitasi sosial
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial dan pengumpulan dana UKS	Penyelenggara PUB/UGB	Perlindungan dan jaminan sosial
			Pekerja Sektor Informal	Perlindungan dan jaminan sosial
			Kabupaten/ Kota Lokasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH	Perlindungan dan jaminan sosial
	4 Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial
			Pekerja Sosial	Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial
			Pengelola Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial Milik Masyarakat/ Swasta	Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial

			Hasil Kajian	Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial
			Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana kesejahteraan sosial
			Petugas Kab/Kota	Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesos
		Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya	Masyarakat luas	Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesos
			Tenaga Penyuluh masyarakat	Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan kesos
		Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PMKS luar Balai dan Panti Sosial	Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial

		Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Penerima Manfaat Balai yang menjelang purna bina	Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial
			Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesos
	5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Balai dan Unit Resos Milik Pemrov Jateng	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesos
			Penerima Manfaat Balai Rehabilitasi Sosial	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesos
			Kelayan Panti Swasta	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesos
			Orang terlantar/kehabisan bekal	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesos

			PMKS hasil penjangkauan/ penjangkauan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan kesos
			Program dan kegiatan Dinas Sosial	Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesos

TABEL 11.
MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN TARGET JANGKA MENENGAH DINAS SOSIAL
TAHUN 2013 - 2018

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2013	Target Capaian Sasaran				
						Tahun-1 2014	Tahun-2 2015	Tahun-3 2016	Tahun-4 2017	Tahun-5 2018
Mewujudkan Kemandirian Kesejahteraan Sosial PMKS Melalui Pemberdayaan PSKS Yang Profesional	Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlantar	Anak terlantar	Prosentase penanganan anak terlantar	540 anak dan 1 yayasan	400 anak dan 1 yayasan	520 anak dan 1 yayasan	520 anak dan 1 yayasan	520 anak dan 1 yayasan	420 anak dan 1 yayasan
		Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlantar	Lanjut usia terlantar	Prosentase penanganan lanjut usia terlantar	820 orang	500 orang	785 orang	800 orang	850 orang	690 orang
		Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlantar	Anak Nakal/ Anak Berhadapan dengan Hukum	Prosentase anak nakal/ABH yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan Sosial	800 anak	250 anak	350 anak	300 anak	300 anak	300 anak

		Meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia terlantar	Anak Jalanan	Prosentase anak jalanan yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan Sosial	450 anak	600 anak	700 anak	600 anak	450 anak	450 anak
		Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Disabilitas (penyandang cacat)	Penyandang Disabilitas (Cacat)	Prosentase penanganan penyandang disabilitas	1.670 orang	1.700 orang	1400 orang	1100 orang	1000 orang	800 orang
		Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Disabilitas (penyandang cacat)	Masyarakat yang rentan mengalami kecacatan/ penyandang disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas (Cacat) yang teridentifikasi	1.100 orang	1200 orang	1200 orang	1200 orang	1200 orang	1200 orang

		Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	Prosentase penanganan BWBLP	100 orang	100 orang	175 orang	100 orang	75 orang	50 orang
		Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	Eks Pekerja Sosial Komersial (PSK)	Prosentase penanganan eks Pekerja Sosial Komersial (PSK)	30 orang	100 orang	100 orang	75 orang	75 orang	50 orang
		Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Prosentase penanganan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang terehabilitasi	150 orang	50 orang	150 orang	150 orang	150 orang	150 orang
	Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	Eks Korban Narkoba/ NAPZA	Prosentase eks korban narkoba/ NAPZA yang terehabilitasi	90 orang	150 orang	150 orang	125 orang	100 orang	75 orang

		Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	PGOT dan TRC	Jumlah Tuna Sosial Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang terjaring dan terehabilitasi	1.495 orang	1300 orang	1050 orang	1050 orang	1000 orang	1025 orang
		Meningkatnya upaya rehabilitasi kesejahteraan dan fungsi sosial PGOT dan Eks Tuna Sosial	PGOT	Prosentase penanganan PGOT	500 orang	500 orang	200 orang	150 orang	150 orang	100 orang
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan sosial Keluarga, Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase PSKS yang memahami pengarusutamaan gender	70 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase kader perempuan yang berperan dalam penyelenggaraan UKS	132 orang	100 orang	105 orang	105 orang	105 orang	105 orang

		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Karang Taruna (KT) yang melaksanakan UKS	700 orang	700 orang	700 orang	700 orang	700 orang	700 orang
		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah Coorpater Sosial Responsibility (CSR) bidang kesejahteraan Sosial	500 DU	400 DU	210 DU	175 DU	280 DU	175 DU
		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mampu melaksanakan UKS	35 pag PSM, 23 FK PSM, 1 FK PSM Prov	100 orang	100 orang	100 orang	100 org	100 org

		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Organisasi Sosial (Orsos) yang melaksanakan UKS	85 orsos	70 orsos	80 orsos	85 orsos	70 orsos	80 orsos
		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang melaksanakan UKS	573 orang	573 orang	573 orang	573 orang	573 orang	573 orang
		Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang melaksanakan UKS	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota	35 kab/kota

		Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE)	Prosentase Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE) yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya	3500 KK	3500 KK	4500 KK	4000 KK	4000 KK	4000 KK
		Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah KAT yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya	200 KK	200 KK	200 KK	200 KK	200 KK	200 KK
		Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Perintis kemerdekaan, veteran, janda pahlawan dan keluarganya yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	Jumlah perintis kemerdekaan, veteran, janda pahlawan dan keluarganya yang mendapatkan perlindungan sosial	395 orang	300 orang	735 orang	735 orang	735 orang	735 orang
	Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial	Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Prosentase kejadian bencana yang tertangani	10000 orang	10000 orang	10000 orang	11000 orang	11000 orang	12000 orang

		Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana	Lokasi Bencana	Jumlah lokasi bencana yang terecovery	13 lokasi	13 lokasi	14 lokasi	14 lokasi	15 lokasi	16 lokasi
		Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Bencana	Taruna Siaga Bencana	Jumlah TAGANA yang siap diterjunkan ke lokasi bencana	350 orang	350 orang	400 orang	400 orang	450 orang	500 orang
		Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Prosentase KTK yang mampu kembali ke fungsi sosial	150 orang	100 orang	150 Orang	150 orang	200 orang	200 orang
		Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Prosentase KTK dan PMBS yang mendapatkan perlindungan sosial	750 orang	300 orang	400 orang	500 orang	500 orang	500 orang

		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial dan pengumpulan dana UKS	Penyelenggara PUB/UGB	Jumlah Dana UKS yang terkumpul	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial dan pengumpulan dana UKS	Pekerja Sektor Informal	Prosentase pekerja sektor informal mengikuti JKSGR	6 kelompok	100 orang	80 orang	80 orang	100 orang	100 orang
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan sosial dan pengumpulan dana UKS	Kabupaten/ Kota Lokasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan PKH	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PKH	15 Kab/ Kota	24 Kab/ Kota	35 kab/ kota	35 kab/ kota	35 kab/ kota	35 kab/ kota
	Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Prosentase LKS yang siap terakreditasi	40 lembaga	40 lembaga	40 lembaga	40 lembaga	40 lembaga	40 lembaga

		Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pekerja Sosial	Prosentase pekerja sosial mengikuti sertifikasi	60 orang	60 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
		Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Pengelola Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial Milik Masyarakat/Swasta	Prosentase pengelola balai resos dan panti sosial yang dapat mengimplementasikan hasil bintek entrepreneurship	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	50 orang	50 orang
		Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Hasil Kajian	Prosentasi Implementasi kajian terhadap peningkatan pelayanan kessos	18 Balai	52 Balai Resos dan Pan Sos	27 Balai Resos dan Pan Sos	27 Balai Resos dan Pan Sos	27 Balai Resos dan Pan Sos	27 Balai Resos dan Pan Sos
		Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Balai dan Panti Sosial yang melaksanakan standar pelayanan	150 orang	18 Balai Resos dan Panti Sosial	25 unit Resos dan Panti Sosial	30 Balai Resos dan panti swasta	27 Balai Resos dan Panti Sosial	25 Unit Resos dan Panti Sosial

		Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Petugas Kab/Kota	Prosentase petugas yang memahami perencanaan responship gender bidang kesejahteraan sosial	54 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang
		Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya	Masyarakat luas	Prosentase masyarakat yang menyampaikan informasi kembali ke masyarakat	6300 orang	800 orang	1000 orang	1250 orang	1500 orang	2000 orang
		Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya	Tenaga Penyuluh masyarakat	Prosentase penyuluh yang menyampaikan informasi kembali ke masyarakat	200 orang	75 orang	100 orang	200 orang	200 orang	200 orang
		Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PMKS luar Balai dan Panti Sosial	Prosentase PMKS yang mampu bekerja/mandiri	2060 orang	1600 orang	2170 orang	1900 orang	1700 orang	1500 orang

		Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Penerima Manfaat Balai yang menjelang purna bina	Prosentase penerima manfaat siap kembali ke masyarakat	1 paket	20 orang	20 orang	20 orang	30 orang	30 orang
		Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Prosentase penanganan PMKS melalui pemberdayaan PSKS	4 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa	8 desa
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Balai dan Unit Resos Milik Pemrov Jateng	Prosentase Balai Resos yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana	1 paket (7 Balai)	10 Balai/Unit Resos	12 Balai/Unit Resos	12 Balai/Unit Resos	12 Balai/Unit Resos	12 Balai/Unit Resos
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Penerima Manfaat Balai Rehabilitasi Sosial	Prosentase penerima manfaat terlayani pada Balai Resos	4092 orang	4092 orang	4092 orang	4092 orang	4092 orang	4092 orang

		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kelayan Panti Swasta	Prosentase kelayan panti swasta yang mendapatkan subsidi permakanaan	3978 orang	3680 orang	3680 orang	3680 orang	3680 orang	3680 orang
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Orang terlantar/ kehabisan bekal	Jumlah orang terlantar yang dapat dipulangkan ke daerah asal	1800 orang	1800 orang	1800 orang	1800 orang	1800 orang	1800 orang
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	PMKS hasil penjangkauan/ penjangkauan	Jumlah penerima manfaat yang dapat dirujuk ke Balai Resos	15 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang	20 orang
		Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Program dan kegiatan Dinas Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Dinas Sosial	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada pencapaian target kinerja Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun dan pencapaian target penerapan SPM Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2015 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya implementasinya terintegrasi ke dalam tugas pokok fungsi Unit Kerja Eselon III, sebagai berikut:

- a. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial**, dengan fokus kegiatan:
 - 1) Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Cacat.
 - 2) Fasilitasi Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - 3) Fasilitasi Penyantunan Terhadap Lanjut Usia (LU).
 - 4) Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Nakal/ Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
 - 5) Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan, Pelayanan Sosial Terhadap Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP).
 - 6) Pelayanan Sosial Terhadap eks Pekerja Seks Komersil (PSK).
 - 7) Pelayanan Sosial Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).
 - 8) Pelayanan Sosial Terhadap Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar.
 - 9) Pelayanan Sosial Terhadap eks Korban Narkoba (NAPZA).
 - 10) Penjaringan dan Pendampingan Sosial bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) dan Kelompok Rentan.
- b. **Program Pemberdayaan Sosial**, dengan fokus kegiatan:
 - 1) Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (KRSE).
 - 2) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT).
 - 3) Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan nasional, Veteran dan Keluarganya.

- 4) Bimbingan Sosial dan Fasilitasi Kader Perempuan Bidang Kesos.
 - 5) Pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan PMKS, melalui Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan pekerja sosial.
- c. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**, dengan fokus kegiatan:
- 1) Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH).
 - 2) Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana
 - 3) Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
 - 4) Pengerahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dalam Bidang Rekoferi (Pembersihan Bencana).
 - 5) Pengembangan Jaminan Sosial Gotong Royong (JSGR).
 - 6) Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Penarikan Undian di Jawa Tengah.
 - 7) Penanganan dan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) dan Korban Tindak Kekerasan.
 - 8) Fasilitasi Rehabilitasi Psikososial dan Reintegrasi Sosial Bagi Korban Kekerasan.
- d. **Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial**, dengan fokus kegiatan:
- 1) Pembinaan PMKS melalui Warung Sosial.
 - 2) Pengkajian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
 - 3) Pemberdayaan Sosial melalui Desa Sejahtera.
 - 4) Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penerima Manfaat Pada Balai Rehabilitasi Sosial.
 - 5) Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan.
 - 6) Pengarusutamaan Gender di bidang Kesejahteraan Sosial.
 - 7) Sosialisasi dan Bimbingan Petugas Kab/Kota Program Pengarusutamaan Gender Bidang Kessos.
 - 8) Penyuluhan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tanggung Jawab dan Kesetiakawanan Sosial.
 - 9) Rintisan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
 - 10) Rintisan Pelaksanaan Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional.

- 11) Bimbingan Teknis Organisasi Managemen Enterpreneurship Bagi Pengelola Balai Rehabilitasi Sosial.
- 12) Bimbingan Teknis Tenaga Penyuluh Sosial Swadaya Masyarakat.

Tabel. 12.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Kondisi awal	Target Capaian Sasaran										Kondisi Akhir
			Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		
			K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosentase penanganan anak terlantar	540 anak dan 1 yayasan adopsi anak	400 anak dan 1 yayasan	600.000	520 anak dan 1 yayasan	1.100.000	520 anak dan 1 yayasan	1.200.000	520 anak dan 1 yay	1.200.000	440 anak dan 1 yayasan	1.000.000	
Kegiatan Penanganan terhadap Anak dan Remaja Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial	540 anak dan 1 yayasan adopsi anak	400 anak dan 1 yayasan	600.000	520 anak dan 1 yayasan	1.100.000	520 anak dan 1 yayasan	1.200.000	520 anak dan 1 yay	1.200.000	440 anak dan 1 yayasan	1.000.000	2400 anak dan 1 yay
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase penanganan lanjut usia terlantar	820 orang	500 orang	1.000.000	785 orang	1.550.000	800 orang	1.600.000	850 orang	1.700.000	690 orang	1.400.000	
Kegiatan Fasilitasi Penyantunan Terhadap LU Potensial	Jumlah Lanjut Usia yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	820 orang	500 orang	1.000.000	785 orang	1.550.000	800 orang	1.600.000	850 orang	1.700.000	690 orang	1.400.000	3265 orang
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase anak nakal/ABH yang mendapatkan perlindungan kessos	800 anak	250 anak	300.000	350 anak	682.500.000	300 anak	645.000	300 anak	645.000	300 anak	645.000	
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Nakal / ABH	Jumlah anak nakal/ABH yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial	800 anak	250 anak	300.000	350 anak	682.500	300 anak	645.000	300 anak	645.000	300 anak	645.000	800 anak

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase anak jalanan yang mendapatkan perlindungan kessos		600 anak	450.000	700 anak	1.250.000	600 anak	1.050.000	450 anak	750.000	450 anak	750.000	
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Terhadap anak Jalanan	Jumlah anak jalanan yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial	600 anak	600 anak	450.000	700 anak	1.250.000	600 anak	1.050.000	450 anak	750.000	450 anak	750.000	2800 anak
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	prosentase penanganan penyandang disabilitas	1670 orang	1700 orang	2.500.000	1400 orang	2.850.000	1100 orang	2.750.000	1000 orang	2.650.000	800 orang	2.500.000	
Kegiatan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Cacat	Jumlah Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat) yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1670 orang	1700 orang	2.500.000	1400 orang	2.850.000	1100 orang	2.750.000	1000 orang	2.650.000	800 orang	2.500.000	6000 orang
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas yang teridentifikasi	1100 orang	1200 orang	1.300.000	1200 orang	2.000.000	1200 orang	2.000.000	1200 orang	2.000.000	1200 orang	2.000.000	
Kegiatan Fasilitas Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) terhadap PMKS	Jumlah Penyandang Disabilitas (Penyandang Cacat) yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui UPSK	1100 orang	1200 orang	1.300.000	1200 orang	2.000.000	1200 orang	2.000.000	1200 orang	2.000.000	1200 orang	2.000.000	6000 orang

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase penanganan BWBLP	100 orang	100 orang	200.000	175 orang	650.000	100 orang	350.000	75 orang	300.000	50 orang	250.000	
Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP) yang terhabilitasi	100 orang	100 orang	200.000	175 orang	650.000	100 orang	350.000	75 orang	300.000	50 orang	250.000	500 orang
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase penanganan eks PSK	30 orang	100 orang	200.000	100 orang	300.000	75 orang	275.000	75 orang	275.000	50 orang	250.000	
Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Eks Pekerja Sosial Komersial (PSK)	Jumlah Tuna Sosial Eks Pekerja Sosial Komersial (PSK) yang terhabilitasi	30 orang	100 orang	200.000	100 orang	300.000	75 orang	275.000	75 orang	275.000	50 orang	250.000	400 orang
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase penanganan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang terhabilitasi	150 orang	50 orang	150.000	150 orang	550.000	150 orang	550.000	150 orang	550.000	150 orang	550.000	
Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Tuna Sosial Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang terhabilitasi dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	150 orang	50 orang	150.000	150 orang	550.000	150 orang	550.000	150 orang	550.000	150 orang	550.000	650 orang

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase eks korban narkoba/ NAPZA yang terehabilitasi	150 orang	150 orang	200.000	150 orang	350.000	125 orang	350.000	100 orang	300.000	75 orang	250.000	
Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Eks Korban Narkoba / NAPZA	Jumlah Eks Korban Narkoba / NAPZA yang terehabilitasi	150 orang	150 orang	200.000	150 orang	300.000	125 orang	330.000	100 orang	300.000	75 orang	250.000	600 orang
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase penanganan tuna Sosial	1495 orang	1300 orang	1.200.000	1050 orang	800.000	1050 orang	800.000	1000 orang	800.000	1025 orang	800.000	
Kegiatan Penjaringan dan Pendamping Sosial bagi Pengemis, Gelandangan Orang Terlantar dan Kelompok Rentan	Jumlah Tuna Sosial Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang terjaring dan terehabilitasi	1495 orang	1300 orang	1.200.000	1050 orang	800.000	1050 orang	800.000	1000 orang	800.000	1025 orang	800.000	5425 orang
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase penanganan PGOT	500 orang	500 orang	550.000	200 orang	600.000	150 orang	525.000	150 orang	525.000	100 orang	475.000	
Kegiatan Pelayanan Sosial Terhadap Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Jumlah Tuna Sosial PGOT yang terehabilitasi agar dapat menjalankan fungsi sosial	90 orang	500 orang	550.000	200 orang	600.000	150 orang	525.000	150 orang	525.000	100 orang	475.000	1100 orang

Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Prosentase PSKS yang memahami pengarusutamaan gender	70 orang	100 orang	60.000	100 orang	155.000	100 orang	160.000	100 orang	165.000	100 orang	170.000	
Kegiatan Pengarusutamaan Gender di bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas	70 orang	100 orang	60.000	100 orang	155.000	100 orang	160.000	100 orang	165.000	100 orang	170.000	500 orang
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosentase kader perempuan yang berperan dalam penyelenggaraan UKS	132 orang	100 orang	75.000	105 orang	160.000	105 orang	160.000	105 orang	175.000	105 orang	175.000	
Kegiatan Bimbingan Sosial dan Fasilitasi Kader Perempuan Bidang Kesos	Jumlah Kader perempuan yang mendapatkan bimbingan sosial	132 orang	100 orang	75.000	105 orang	160.000	105 orang	160.000	105 orang	175.000	105 orang	175.000	520 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Karang Taruna yang melaksanakan UKS	700 orang	700 orang	2.000.000	700 orang	2.200.000	700 orang	2.300.000	700 orang	2.350.000	700 orang	2.500.000	
Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah anggota Karang Taruna yang mendapatkan pembinaan	700 orang	700 orang	2.000.000	700 orang	2.200.000	700 orang	2.300.000	700 orang	2.350.000	700 orang	2.500.000	3500 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah CSR bidang kesejahteraan sosial	500 DU	400 DU	150.000	210 DU	400.000	175 DU	500.000	280 DU	600.000	175 DU	650.000	
Kegiatan Pemberdayaan dan Kerjasama Dunia Usaha	Jumlah kemitraan dengan dunia usaha	500 DU	400 DU	150.000	210 DU	400.000	175 DU	500.000	280 DU	600.000	175 DU	650.000	1240 DU

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mampu melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial	35 Pag PSM, 23 FK PSM, 1 FK PSM Provinsi	100 orang	150.000	100 orang	1.000.000	100 orang	1.100.000	100 orang	1.200.000	100 orang	1.200.000	
Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mendapatkan pembinaan	35 pag PSM, 23 FK PSM, 1 FK PSM Prov	100 orang	150.000	100 orang	1.000.000	100 orang	1.100.000	100 orang	1.200.000	100 orang	1.200.000	500 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase organisasi sosial yang melaksanakan UKS	85 orsos	70 orsos	1.000.000	80 orsos	3.500.000	85 orsos	3.950.000	70 orsos	3.950.000	80 orsos	5.000.000	
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Orsos yang bergerak di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial(UKS)	Jumlah Organisasi sosial yang mendapatkan pembinaan	85 orsos	70 orsos	1.000.000	80 orsos	3.500.000	85 orsos	3.950.000	70 orsos	3.950.000	80 orsos	5.000.000	385 orsos
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase TKSK yang melaksanakan UKS	573 orang	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	
Kegiatan Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Jumlah TKSK yang diberdayakan	573 orang	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang	2.260.000	573 orang

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase LK 3 yang melaksanakan UKS	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	100.000	35 Kab/Kota	205.000	35 Kab/Kota	210.000	35 Kab/Kota	210.000	35 Kab/Kota	215.000	
Kegiatan Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga	Jumlah LK 3 yang mendapatkan pembinaan	35 kab/kota	35 kab/kota	100.000	35 kab/kota	205.000	35 kab/kota	210.000	35 kab/kota	210.000	35 kab/kota	215.000	35 kab/kota
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase KRSE dan WRSE yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya	3500 KK	3500 KK	4.250.000	4500 KK	6.500.000	4000 KK	6.000.000	4000 KK	6.000.000	4000 KK	6.000.000	
Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah KRSE dan WRSE mendapatkan pembinaan	3500 KK	3500 KK	4.250.000	4500 KK	6.500.000	4000 KK	6.000.000	4000 KK	6.000.000	4000 KK	6.000.000	20000 KK
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah KAT yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosialnya	200 KK	200 KK	400.000	200 KK	600.000	200 KK	600.000	200 KK	600.000	200 KK	600.000	
Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	Jumlah KAT yang mendapatkan pembinaan	200 KK	200 KK	400.000	200 KK	600.000	200 KK	600.000	200 KK	600.000	200 KK	600.000	1000 KK

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah perintis kemerdekaan, veteran, janda pahlawan dan keluarganya yang mendapatkan perlindungan sosial	395 orang	300 orang	900.000	735 orang	1.300.000	735 orang	1.300.000	735 orang	1.400.000	735 orang	1.500.000	
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan/Pahlawan Nasional, Veteran dan Keluarganya	Jumlah perintis kemerdekaan, veteran, janda pahlawan dan keluarganya yang mendapatkan pembinaan	395 orang	300 orang	900.000	735 orang	1.200.000	735 orang	1.300.000	735 orang	1.400.000	735 orang	1.500.000	3240 orang
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Prosentase kejadian bencana yang tertangani	10000 orang	10000 orang	700.000	10000 orang	750.000	11000 orang	800.000	11000 orang	800.000	12000 orang	1.000.000	
Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan dasar (pangan) bagi korban bencana	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10000 orang	10000 orang	700.000	10000 orang	750.000	11000 orang	800.000	11000 orang	800.000	12000 orang	1.000.000	54000 orang
Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah lokasi bencana yang terecovery	13 lokasi	13 lokasi	150.000	14 lokasi	350.000	14 lokasi	350.000	15 lokasi	400.000	16 lokasi	500.000	
Kegiatan Pengerahan TAGANA dalam bidang Rekoferi (Pembersihan Bencana)	Jumlah lokasi bencana yang direcovery	13 lokasi	13 lokasi	150.000	14 lokasi	350.	14 lokasi	350.000	15 lokasi	400.000	16 lokasi	500.000	72 lokasi

Program Penyelenggara Penanggulangan Bencana	Jumlah TAGANA yang siap diterjunkan ke lokasi bencana	350 orang	350 orang	150.000	400 orang	300.000	400 orang	300.000	450 orang	450.000	500 orang	500.000	
Kegiatan Pemantapan TAGANA	Jumlah TAGANA yang mengikuti pemantapan	350 orang	350 orang	150.000	400 orang	300.000	400 orang	300.000	450 orang	400.000	500 orang	500.000	2100 orang
Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan Anak	Prosentase KTK yang mampu kembali ke fungsi sosial	150 orang	100 orang	200.000	150 orang	300.000	150 orang	300.000	200 orang	400.000	200 orang	400.000	
Kegiatan Fasilitasi Rehabilitasi Psikososial dan Reintegrasi Sosial bagi Korban Kekerasan	Jumlah KTK yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	150 orang	100 orang	200.000	150 orang	300.000	150 orang	300.000	200 orang	400.000	200 orang	400.000	800 orang
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase KTK dan PMBS yang mendapatkan perlindungan sosial	750 orang	300 orang	600.	400 orang	850.000	500 orang	900.000	500 orang	950.000	500 orang	950.000	
Kegiatan Penanganan dan Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) dan Korban Tindak Kekerasan	Jumlah PMBS dan KTK yang mendapatkan perlindungan sosial	750 orang	300 orang	600.000	400 orang	850.000	500 orang	900.000	500 orang	950.000	500 orang	950.000	2200 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dana UKS yang terkumpul	35 kab/kota	35 kab/kota	125.000	35 kab/kota	175.000	35 kab/kota	200.000	35 kab/kota	200.000	35 kab/kota	200.000	

Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Penarikan Undian di Jawa Tengah	Jumlah penyelenggaraan undian yang sesuai dengan regulasi	35 kab/Kota	35 kab/Kota	125.000	35 kab/Kota	175.000	35 kab/Kota	200.000	35 kab/Kota	200.000	35 kab/Kota	200.000	35 kab/Kota
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase pekerja sektor informal mengikuti JKSGR	6 kelompok	100 orang	150.000	80 orang	300.000	80 orang	300.000	100 orang	400.000	100 orang	400.000	
Kegiatan Pengembangan Sistem Jaminan Sosial Gotong Royong (JKS-GR)	Jumlah pekerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	6 klp	100 orang	150.000	80 orang	300.000	80 orang	300.000	100 orang	400.000	100 orang	400.000	460 orang
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PKH	24 kab/Kota	24 kab/Kota	300.000	35 Kab/Kota	600.000	35 Kab/Kota	800.000	35 Kab/Kota	800.000	35 Kab/Kota	800.000	
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah RTSM yang mendapat bantuan	24 kab/kota	24 kab/Kota	300.000	35 Kab/Kota	600.000	35 Kab/Kota	800.000	35 Kab/Kota	800.000	35 Kab/Kota	800.000	35 kab/kota
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase LKS yang siap terakreditasi	40 LKS	40 LKS	75.000	40 LKS	125.000	40 LKS	125.000	40 LKS	125.000	40 LKS	125.000	
Kegiatan Rintisan pelaksanaan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial	Jumlah LKS yang mengikuti rintisan Akreditasi	40 LKS	40 LKS	75.000	40 LKS	125.000	40 LKS	125.000	40 LKS	125.000	40 LKS	125.000	200 LKS

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase pekerja sosial mengikuti sertifikasi	60 orang	60 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	
Kegiatan Rintisan Pelaksanaan Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pekerja Sosial yang mengikuti rintisan Sertifikasi	60 orang	60 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	50 orang	100.000	260 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase pengelola balai resos dan panti sosial yang dapat mengimplementasikan hasil bintek entrepreneur	60 orang	60 orang	100.000	60 orang	150.000	60 orang	150.000	50 orang	150.000	50 orang	150.000	
Kegiatan Bimbingan Teknis Organisasi Manajemen Enterpreneurship Bagi Pengelolaan Balai Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pengelola Balai Rehabilitasi Sosial dan Panti Sosial yang mengikuti bintek Enterpreneurship	60 orang	60 orang	100.000	60 orang	150.000	60 orang	150.000	50 orang	150.000	50 orang	150.000	280 orang
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah kajian pelayanan kesejahteraan	18 Balai Resos	52 balai resos dan Panti Sosial	1.500.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	150.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	150.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	150.000	25 Balai Resos dan Panti Sosial	150.000	
Kegiatan Pengkajian Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah kajian pelayanan kesejahteraan	18 Balai	52 balai resos dan Panti Sosial	150.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	150.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	150.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	150.000	25 Balai Resos dan Panti Sosial	150.000	160 balai resos dan panti sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah Balai dan Panti Sosial yang melaksanakan standar pelayanan	150 orang	18 Balai Resos dan Panti Sosial	200.000	25 Balai Resos dan Panti Sosial	300.000	30 Balai Resos dan Panti Sosial	400.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	350.000	25 Balai Resos dan Panti Sosial	300.000	
Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penerima Manfaat pada Balai Rehabilitasi Sosial	Jumlah balai dan panti Sosial yang dievaluasi standar pelayanan	150 orang	18 Balai Resos dan Panti Sosial	200.000	25 Balai Resos dan Panti Sosial	300.000	30 Balai Resos dan Panti Sosial	400.000	27 Balai resos dan Panti Sosial	350.	25 Balai Resos dan Panti Sosial	300.000	125 Balai resos dan panti sosial
Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Prosentase petugas yang memahami perencanaan responship gender bidang kesejahteraan sosial	54 orang	100 orang	80.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	
Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Petugas Kab/Kota Program Pengarusutamaan Gender bidang Kesos	Jumlah petugas yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan pengarusutamaan gender bidang kesejahteraan sosial	54 orang	100 orang	80.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	100 orang	200.000	500 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase masyarakat yang menyampaikan informasi kembali ke masyarakat	6300 orang	800 orang	250.000	1000 orang	800.000	1250 orang	850.000	1500 orang	900.000	2000 orang	1.000.000	

Kegiatan Penyuluhan Sosial dalam rangka peningkatan kualitas tanggung jawab dan Kesetiakawanan sosial	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan sosial	6300 orang	800 orang	250.000	1000 orang	800.000	1250 orang	850.000	1500 orang	900.000	2000 orang	1.000.000	6550 orang
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase penyuluh yang menyampaikan informasi kembali ke masy	200 orang	75 orang	100.000	100 orang	150.000	200 orang	200.000	200 orang	250.000	200 orang	250.000	
kegiatan bimbingan teknis tenaga penyuluh sosial swadaya masyarakat	Jumlah penyuluh sosial swadaya masyarakat yang mengikuti bimbingan teknis	200 orang	75 orang	100.000	100 orang	150.000	200 orang	200.000	200 orang	250.000	200 orang	250.000	775 orang
Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Prosentase PMKS yang mampu bekerja/mandiri	2060 orang	1600 orang	4.000.000	2170 orang	4.000.000	1900 orang	4.000.000	1700 orang	4.000.000	1500 orang	3.500.000	
Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	Jumlah PMKS luar Balai/Panti yang terdidik	2060 orang	1600 orang	4.000.000	2170 orang	4.000.000	1900 orang	4.000.000	1700 orang	4.000.000	1500 orang	3.500.000	8870 orang
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit lainnya)	Prosentase penerima manfaat siap kembali ke masyarakat	20 orang	20 orang	125.000	20 orang	150.000	20 orang	150.000	30 orang	200.000	30 orang	200.000	
Kegiatan Pembinaan PMKS melalui Warung Sosial	Jumlah penerima manfaat yang dibina	20 orang	20 orang	125.000	20 orang	150.000	20 orang	150.000	30 orang	200.000	30 orang	200.000	120 orang
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase penanganan PMKS melalui pemberdayaan PSKS	4 desa	4 desa	200.000	8 desa	500.000	8 desa	500.000	8 desa	500.000	8 desa	500.000	

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Melalui Desa Sejahtera	Jumlah PSKS yang melakukan pelayanan PMKS	4 desa (80 orang)	4 desa	200.000	8 desa	500.000	8 desa	500.000	8 desa	500.000.000	8 desa	500.000	36 desa
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase Balai Resos yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana	10 Balai / unit resos	10 Balai/ Unit Resos	5.600.000	12 Balai/ Unit Resos	8.000.000	12 Balai/ Unit Resos1	8.000.000	12 Balai/ Unit Resos	10.000.000	12 Balai/ Unit Resos	10.000.000	
Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Panti - Panti Sosial Pemda Jawa Tengah	Jumlah balai dan unit resos yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana	10 Balai dan Unit Resos	10 Balai dan Unit Resos	5.600.000	12 Balai dan Unit Resos	8.000.000	12 Balai dan Unit Resos	10.000.000	12 Balai dan Unit Resos	10.000.000	12 Balai dan Unit Resos	10.000.000	50 balai dan unit resos
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase penerima manfaat terlayani pada Balai Resos	4092 orang	4092 orang	29.871.600	4092 orang	37.339.500	4092 orang	37.339.500	4092 orang	37.339.500	4092 orang	37.339.500	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kelayan panti swasta yang mendapatkan subsidi permakanan	3978 orang	3680 orang	2.686.400	3680 orang	3.358.000	3680 orang	3.358.000	3680 orang	3.358.000	3680 orang	3.358.000	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kelayan panti swasta yang mendapatkan subsidi bantuan permakanan	3.680 orang	3.680 orang	2.686.400	3.680 orang	2.686.400	3.680 orang	2.686.400	3.680 orang	2.686.400	3.680 orang	2.686.400	3.680 orang
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penerima manfaat yang mendapatkan penyediaan makanan dan minuman (SOSH)	4092 orang	4092 orang	29.871.600	4092 orang	37.339.500	4092 orang	37.339.500	4092 orang	37.339.500	4092 orang	37.339.500	4092 orang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah orang terlantar yang dapat dipulangkan ke daerah asal	1800 orang	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang terlantar yang mendapatkan bantuan makan dan minum	1800 orang	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang	31.500	1800 orang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penerima manfaat yang dapat dirujuk ke Balai Resos	15 orang	20 orang	146.000	20 orang	146.000	20 orang	146.000	20 orang	146.000	20 orang	146.000	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah PMKS hasil penjarangan yang mendapatkan SOSH	15 orang	20 orang	146.000	20 orang	146.000	20 orang	146.000	20 orang	146.000	20 orang	146.000	100 orang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Dinas Sosial	1 dok	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Dinas Sosial	1 dok	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	1 dok	30.000	5 dok

BAB VI
INDIKATOR KENERJA DINAS SOSIAL MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH

Merujuk pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 bahwa indikator kinerja urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah Jumlah penanganan PMKS, Jumlah PSKS yang mendapat penguatan kapasitas serta jumlah Balai Rehabilitasi Sosial yang mendapatkan peningkatan sarana prasarana.

Tabel 11.
INDIKATOR PROGRAM DAN TARGET KINERJA DINAS SOSIAL TAHUN
2013-2018

No	Program	Indikator Program	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir Renstra
			2014	2015	2016	2017	2018	
1	3	4	6	7	8	9	10	11
1.	Program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan	33.712	34.807	35.352	35.147	34.337	173.355
2.	Program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan Bantuan Sosial	6.421	7.411	6.776	6.821	7.311	34.740
3.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS	2.298	2.368	2.468	2.508	2.558	12.200
4.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Balai Rehabilitasi Sosial milik Provinsi yang memiliki sarana prasarana sesuai dengan standar pelayanan (peningkatan sarana dan prasarana)	10	12	12	12	12	58

BAB VII PENUTUP

1. Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD Tahun 2013-2018 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 dan mengacu RPJMN Tahun 2015-2019 yang selanjutnya secara operasional akan di *breakdown* ke dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan panduan bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Gubernur berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- d. Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD;

- e. Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan RPJMD;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra SKPD di lingkup Provinsi Jawa Tengah, dan melakukan fasilitasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ini merupakan sebuah alat manajemen untuk mengelola kondisi saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya) serta petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja menuju 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Sosial yang mangacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap memperhatikan aspek normatif seperti diatur dalam peraturan Perundangan-Undangan. Penyusunan Program – program dalam RENSTRA ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis berada pada ordo yang lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk-produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah termasuk tugas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan serta tugas lainnya, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Tengah.

Untuk menjaga dan mengendalikan pemanfaatan RENSTRA serta konsistensi dokumen-dokumen perencanaan lain diperlukan monitoring dan pelaporan secara reguler dan periodik. Untuk itu diperlukan Tim Monitoring yang terdiri dari unsur Dinas Sosial dan Instansi Terkait, dalam rangka mengukur tingkat kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta diharapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).